

OLD AGE PENSIONS - LAW AND LEGISLATION

**PENGAKUAN KEWAJIBAN DIESTIMASI SESUAI PSAK NO. 57
ATAS MANFAAT PENSIUN KARYAWAN
SEPERTI YANG DIATUR DALAM
UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003
STUDI KASUS PADA PT "X"**

h4
A. 142105
Azi
P

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

DIAJUKAN OLEH

SYAIHUN AZIS

No. Pokok : 040123701 E

KEPADA

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2004

SKRIPSI

**PENGAKUAN KEWAJIBAN DIESTIMASI SESUAI PSAK NO. 57
ATAS MANFAAT PENSIUN KARYAWAN
SEPERTI YANG DIATUR DALAM
UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003
STUDI KASUS PADA PT "X"**

DIAJUKAN OLEH :

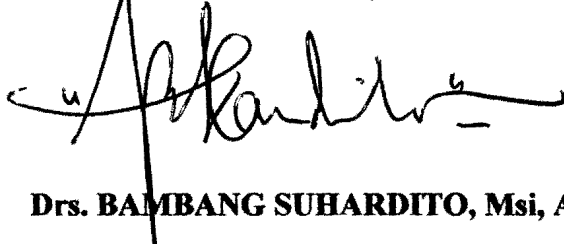
SYAIHUN AZIS

No. Pokok : 040123701 E

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,



Drs. BAMBANG SUHARDITO, Msi, Ak.

TANGGAL 5/1/05

KETUA PROGRAM STUDI,



Drs. M. SUYUNUS, MAFIS, Ak.

TANGGAL.....

ABSTRAK

Berlakunya Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengharuskan seluruh perusahaan untuk memberikan manfaat pensiun kepada setiap karyawan saat terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk perusahaan yang belum mengikutkan karyawannya pada dana Pensiun, berlakunya Undang-undang ini memberikan dampak yang besar terhadap laporan keuangannya, karena perusahaan harus membayar manfaat pensiun seperti yang diatur dalam undang-undang, sedangkan bagi perusahaan yang mengikutkan karyawannya pada Dana Pensiun berlakunya Undang-undang ketenagakerjaan ini tidak banyak memberikan dampak pada laporan keuangannya, karena kewajiban pembayaran manfaat pensiun telah ditanggung oleh Dana Pensiun, sedangkan perusahaan hanya diwajibkan membayar selisihnya, jika ternyata pembayaran yang dilakukan oleh dana Pensiun lebih kecil daripada ketentuan yang diatur oleh Undang-undang.

Dewan Standart Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, pada tanggal 03 Nopember mengesahkan PSAK No. 57 tentang kewajiban diestimasi, kewajiban Kontinjensi, dan Aktiva Kontinjensi. Kewajiban yang timbul akibat dari diberlakukannya Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dapat digolongkan kedalam jenis kewajiban diestimasi.

Skripsi ini menitikberatkan pada kewajiban diestimasi yang timbul akibat penerapan Undang-undang No.13 tahun 2003 pada perusahaan yang belum memiliki Dana Pensiun, adapun metode yang dipilih adalah pendekatan kualitatif, dengan mengambil obyek penelitian pada PT."X", penelitian ini juga akan menguraikan cara perhitungan pengakuan kewajiban pertahun dan apa saja kendala yang dihadapi pada penerapan dilapangan.

Pada prakteknya PT."X" belum melakukan perhitungan beban manfaat pensiun seperti yang diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 2003, hal ini dapat dilihat pada saat karyawan PT."X" mengundurkan diri, PT."X" tidak memberikan kompensasi seperti yang diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 2003, tetapi perusahaan memberikan kompensasi sebesar kebijakan intern perusahaan.

Dalam penghitungan beban manfaat pensiun karyawan sesuai dengan Undang-undang No.13 tahun 2003, Penggunaan metode *projected unit actuarial*, dianjurkan, karena metode ini menjadi metode perhitungan wajib dalam IAS No.19 (*Employee benefit*), dan metode ini membebankan biaya merata dan sedikit meningkat pada setiap tahunnya.

Dalam penerapan metode perhitungan, harus dikaji secara berkala pencapaian asumsi-asumsi yang telah ditetapkan, karena perubahan asumsi akan memungkinkan dilakukannya koreksi atas estimasi yang telah ditetapkan, untuk itulah dibutuhkan jasa dari seorang aktuaris, untuk menilai kembali asumsi-asumsi yang telah digunakan.